



DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA PEKALONGAN



RENJA

DINSOSP2KB
KOTA PEKALONGAN



2025



dinsosp2kb.pekalongankota.go.id



dinsosp2kb@gmail.com



(0285) 422868



Jl. Sriwijaya No. 40 Pekalongan



RENCANA KERJA (RENJA) DINSOS P2KB KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025



**DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA (DINSOS P2KB)
K O T A P E K A L O N G A N
2024**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami panjatkan kehadiran ALLAH SWT, Alhamdulillah dengan rahmatNya Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P2KB) Kota Pekalongan Tahun 2025 telah selesai disusun. Renja ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinsos P2KB 2021-2026, dan telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam Renja ini, secara rinci telah ditetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinsos P2KB Kota Pekalongan pada tahun 2025. Setiap kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, target yang ingin dicapai, serta pagu anggaran sebagai acuan dalam pelaksanaannya.

Diharapkan Renja ini dapat menjadi panduan yang efektif bagi seluruh jajaran Dinsos P2KB dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan Kota Pekalongan dapat tercapai dengan optimal.

Pekalongan, 8 Agustus 2024
Kepala Dinsos P2KB
Kota Pekalongan



YOS ROSYIDI, SIP, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660516 198603 1007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud Dan Tujuan	3
1.4 Sistematika	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	16
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	35
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	36
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	36
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	37
3.3 Program dan Kegiatan	39
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	49
BAB V PENUTUP	54
5.1 Catatan Penting.....	54
5.2 Kaidah Pelaksanaan	54
5.3 Rencana Tindak lanjut.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2023.....	11
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinsos P2KB Kota Pekalongan Tahun 2023 Target Dan Proyeksi Tahun 2024 dan Tahun 2025.....	15
Tabel T-C.31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Pekalongan	23
Tabel T-C.32	Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Dinsos P2KB Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024	35
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DinsosP2KB.....	38
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Dinsos P2KB Tahun 2023 Dan Perkiraan Maju Tahun 2025.....	40
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Dinsos P2KB Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dimana sebagai tindaklanjutnya, Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan Dokumen Perencanaan Tahunan pada level Organisasi Perangkat Daerah dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (renstra) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh OPD dalam satu Tahun Anggaran sehingga memberikan gambaran mengenai Tujuan, Sasaran dan target kinerja OPD sesuai tupoksi. Secara fungsional Renja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen perencanaan lainnya, baik yang terkait dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem pengelolaan keuangan

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah atau selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah terbagi dalam tiga fase, yakni Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, Rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yang

kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Walikota tentang Renja Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah merupakan draft awal sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah pada tahun n.
- b. Selanjutnya rancangan awal renja disempurnakan berdasarkan hasil konsultasi publik menjadi Rancangan Renja, yang disusun sebagai pembahasan dalam penyusunan Rancangan RKPD yang akan dibahas dalam musrenbang tingkat kota.
- c. Hasil musrenbang menjadi dasar penetapan Peraturan Walikota tentang RKPD. Selanjutnya Peraturan Walikota tentang RKPD menjadi dasar dalam menyempurnakan Rancangan Renja menjadi Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.
- d. Rancangan Akhir Renja seluruh Perangkat Daerah akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Renja Perangkat Daerah.

Seluruh tahapan proses merupakan implementasi perencanaan secara partisipatif dengan pendekatan teknokratik, *bottom up*, *top down*, dan *politis*.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja DINSOS P2KB Kota Pekalongan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial Undang-Undang 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 12. Peraturan Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
 13. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 14);
 14. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan

- pembangunan dan keunagan daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 13);
 18. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026;
 19. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan;
 20. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud

Dokumen Renja DINSOS P2KB Kota Pekalongan disusun dengan maksud sebagai arah dan pedoman bagi DINSOS P2KB Kota Pekalongan dalam melaksanakan rencana kegiatan tahunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Tujuan

Dokumen Renja DINSOS P2KB Kota Pekalongan disusun bertujuan antara lain untuk:

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan DINSOS P2KB Kota Pekalongan untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
- c. Menjamin terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. Adanya kesinambungan antara RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPd dan Renja Perangkat Daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Menjalankan tahapan perencanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

1.4 SISTEMATIKA

Rencana Kerja DINSOS P2KB Kota Pekalongan Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja DINSOS P2KB, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang.

Memuat tentang pengertian Renja Dinsos P2KB, Proses Penyusunan Renja, Keterkaitan antara Rencana Kerja (Renja) dengan Dokumen RKPD dan Rencana Strategis (Renstra).

1.2. Landasan Hukum.

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam penyusunan Renja DINSOS P2KB Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja).

1.4. Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Dinsos P2KB Kota Pekalongan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinsos P2KB berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Memuat uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan Dinsos P2KB dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi. Selain itu, juga untuk dapat diketahui dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SDGs. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses yang dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dan penjelasannya. Kemudian menjelaskan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Renja, seperti terdapat rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan awal RKPD, atau program, kegiatan dan sub kegiatan cocok namun besarnya anggaran berbeda.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Memuat uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain : Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinsos P2KB.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Menjelaskan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinsos P2KB.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinsos P2KB.

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap

perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Rencana Kerja (Renja) Dinsos P2KB Kota Pekalongan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis pada tahun yang bersangkutan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinsos P2KB Kota Pekalongan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan, program dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinsos P2KB Kota Pekalongan selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2025.

Pengukuran kinerja kegiatan/sub kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan penetapan indikator kinerja, yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan/sub kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2023 Dinsos P2KB Kota Pekalongan sebesar Rp. 15.054.101.000,- termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN dengan melaksanakan 2 penunjang urusan pemerintahan, 9 program, 17 kegiatan dan 42 sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 14.256.620.613,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 94.70%.

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2024, dengan alokasi pagu anggaran Belanja sebesar Rp. 13.036.773.000,- (belanja gaji dan tunjangan 4.890.512,-) melaksanakan 2 unsur penunjang urusan pemerintahan, 9 program, 17 kegiatan dan 53 sub kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100%, baik realisasi keuangan maupun capaian fisiknya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 serta perkiraan capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam

pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinsos P2KB sebagai berikut:

1. Keterbatasan akses terhadap data dan informasi yang relevan dalam proses perencanaan dalam bidang sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. Koordinasi antar *stake holder* tidak maksimal menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan;
3. Komitmen dan pemahaman bersama untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD perlu ditingkatkan dalam merencanakan kegiatan.
4. Manajemen risiko yang disusun pada akhir tahun dimana proses perencanaan penganggaran sudah sampai pada tahap RAPBD sehingga belum sepenuhnya diimplementasikan secara menyeluruh dalam siklus perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program sehingga potensi risiko belum dikelola secara proaktif dan reaktif.
5. Berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah bahwa hanya terdapat satu indikator dalam satu sub kegiatan sehingga perlu sinkronisasi dengan target kinerja pada periode sebelumnya.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinsos P2KB dalam pelaksanaan urusan bidang sosial dan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu 2023, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan 2023 pada Dinsos P2KB Kota Pekalongan dari urusan bidang sosial dan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dilaksanakan dengan 9 program :

Adapun evaluasi kinerja hasil/ keluaran program/kegiatan/subkegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Pada pelaksanaan Renja Dinsos P2KB Kota Pekalongan tahun 2023, ada satu program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang diharapkan yaitu pada program Pengendalian Penduduk dengan indikator Program persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga. Pada tahun 2023, program ini mempunyai target 100% dan terealisasi sebesar 70,28%. Hal ini disebabkan dikarenakan jumlah pendataan yang dilaksanakan hanya 18 Kelurahan dari total keseluruhan jumlah kelurahan yang ada di Kota Pekalongan sebanyak 27 Kelurahan. Pada Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia

Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan indikator Persentase PPKS (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis) yang mendapat pelayanan sosial. Ditahun 2023, kegiatan ini mempunyai target 100% dan teralisasi 98,98%

Pada Tahun 2023 terdapat beberapa program dan kegiatan yang teralisasi melebihi daripada target kinerja yang sudah direncanakan, antara lain : Program Pemberdayaan Sosial; Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial; Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS); Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT); Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota; Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial; Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota; Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal; Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini dapat terjadi dikarenakan ketepatan dalam perencanaan dan penggarannya.

Faktor yang mendukung tercapainya target kinerja adalah adanya komitmen Pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana dari APBD dan peluang belanja (DAK) oleh pemerintah pusat serta makin pesatnya perkembangan teknologi yang memungkinkan makin terbukanya komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah yaitu perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap indikator-indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap indikator dapat mengukur kinerja pada kegiatan hingga subkegiatan secara spesifik dan tidak terjadi duplikasi dengan indikator lainnya. Sehingga dalam penghitungan realisasi kinerja pada periode akhir renstra dapat secara akurat tersajikan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra DINSOS P2KB Kota Pekalongan yang sudah dilakukan mapping berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021, didasarkan realisasi program, kegiatan dan subkegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023. Capaian evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah dapat dilihat dalam tabel 2.1. dibawah ini :

**Tabel 2.1. REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DINSOSP2KB S/D TAHUN 2023
KOTA PEKALONGAN**

OPD : DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEKALONGAN

02	Indikator Program / Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi 2022	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2023	Persentase capaian target RPJMD	Status Capaian
						Target 2023	Realisasi 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
2.	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
3.	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
4.	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100	98.57	100	100	100	100	Tercapai
5.	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	Persen	100	100	0	100	100	100	100	Tercapai
6.	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
7.	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
8.	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	Persen	75	42	57.14	58	65.41	87.21	112.77	Tercapai
9.	Persentase Keluarga Miskin yang diberdayakan	Persen	10	10	5.23	10	13.61	136.10	136.1	Tercapai
10.	Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang aktif	Persen	75	75	33.33	75	98.38	131.17	131.17	Tercapai
11.	Persentase penyandang disabilitas terlantar,	Persen	100	100	25.16	100	100	100	100	Tercapai

Renja Dinsos P2KB Tahun

02	Indikator Program / Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi 2022	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2023	Persentase capaian target RPJMD	Status Capaian
						Target 2023	Realisasi 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)									
12.	Persentase PPKS (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis) yang mendapat pelayanan sosial	Persen	100	100	83.19	100	98.38	98.38	98.38	Tidak Tercapai
13.	Persentase PPKS lainnya yang mendapat pelayanan sosial di luar panti sosial	Persen	3.98	3.32	26.92	3.55	4.62	116.08	130.14	Tercapai
14.	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan jaminan sosial	Persen	52.49	60.45	10.32	56.69	57.38	109.32	101.21	Tercapai
15.	Persentase graduasi KPM PKH	Persen	10	10	14.33	10	11.65	116.50	116.50	Tercapai
16.	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
17.	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
18.	Persentase pemeliharaan taman makam pahlawan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
19.	Persentase Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
20.	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga	Persen	100	100	99.68	100	70.28	70.28	70.28	Tidak Tercapai

02	Indikator Program / Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (RPJMD 2021-2025)	Realisasi 2022	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2023	Persentase capaian target RPJMD	Status Capaian
						Target 2023	Realisasi 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Persentase ketersediaan dokumen KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
22.	Penurunan angka perkawinan di bawah 21 Tahun	Persen	7.2	8.2	9.02	7.8	14.44	49.86	54.01	Tidak Tercapai
23.	Persentase Angka kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (IKK Output)	Perseribu	7.74	9.72	9.16	9.22	8.8	87.95	104.09	Tercapai
24.	Persentase kepesertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia	Persen	20.8	19.8	12.15	20.20	29.50	141.82	146.05	Tercapai
25.	Unmeet need KB	Persen	12	17	13.08	15	14.95	80.28	99.66	Tidak Tercapai
26.	Persentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.

Analisis kajian terhadap capaian kinerja pelayanan DINSOS P2KB Kota Pekalongan didasarkan pada indikator kinerja yang sudah ditentukan.

Tugas dan Fungsi DINSOS P2KB

Sesuai Peraturan Wali Kota Pekalongan No. 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Kegiatan urusan sosial dan pengendalian penduduk di Pemerintah Kota Pekalongan secara teknis ditangani oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan.

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan merupakan Lembaga Teknis Daerah yang dipimpin Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, pembina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Sosial dan Pengendalian Penduduk.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Perumusan dan penetapan sasaran, program urusan social, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang social, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
- d. Pengoordinasiaan penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial;
- e. Pengoordinasiaan penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. Pengoordinasiaan penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang rehabilitasi sosial;
- g. Pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- h. Pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan,pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan dalam Norma Standar Pelayanan

Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK). Sehubungan belum adanya ketentuan tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelayanan di bidang penanggulangan bencana, maka cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada DINSOSP2KB Kota Pekalongan sesuai tugas pokok dan fungsi menggunakan tolok ukur dan indikator kinerja utama Rencana Strategis DINSOSP2KB Kota Pekalongan.

Kinerja pelayanan DINSOSP2KB Kota Pekalongan dapat dilihat pada capaian pelaksanaan tugas pokoknya memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik pada urusan Sosial, dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan

Berdasarkan data Hasil Evaluasi LKJIP tahun 2023, realisasi capaian kinerja Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota
Pekalongan Tahun 2023 dan Proyeksi Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	6	7	8		9		10	11	12
1	Nilai SAKIP OPD	-	IKU RENSTRA	71.50	73.00	74.50	76.00	71.53	74.40	74.50	76.00	indeks
2	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	-	IKU RENSTRA	3.32	3.43	3.55	3.68	18.39	17.64	3.55	3.68	persen
3	Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	-	IKU RENSTRA	67.45	67.50	67.55	67.60	64.27	61.46	67.55	67.60	persen
4	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	SPM Bidang Sosial	IKK OUTCOME	100	100	100	100	25.16	100	100	100	Persen
5	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	SPM Bidang Sosial	IKK OUTCOME	100	100	100	100	100	100	100	100	Persen

Sumber : Dinsos P2KB Kota Pekalongan, 2024

2.3 ISU ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

2.3.1 Analisis Tingkat Kinerja

Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada Pemerintah Kota Pekalongan, DINSOSP2KB Kota Pekalongan telah menyusun program kerja dalam Rencana Strategis yang memuat tugas pokok dan fungsi dan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Pekalongan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026. Dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, DINSOSP2KB Kota Pekalongan mendukung pencapaian visi "*Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius*" dengan misi pertama "*Meningkatkan Kualitas pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat*" dan misi ketujuh "*Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien berdasarkan prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government*"

Berangkat dari analisis lingkungan strategis dan berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kota Pekalongan melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah, dan kemudahan untuk dikelola.

Isu Strategis berkaitan dengan Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan analisis permasalahan baik dari aspek geografi-demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing antara lain :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial serta Menurunnya Jumlah PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial);
3. Meningkatnya Kepesertaan KB Aktif.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam hal menjalankan peran sebagai koordinator penanggulangan bencana dan pengendalian penduduk keluarga berencana.

Selama menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan tidak terlepas dari berbagai permasalahan

dan hambatan yang dihadapi.

Kapasitas sumberdaya manusia di DINSOSP2KB Kota Pekalongan jika dibandingkan dengan tingginya target pencapaian sasaran dan tujuan indikator belumlah ideal. Pengalaman penanganan kemiskinan, kebencanaan dan *stunting* yang telah dilakukan selama ini merupakan pengalaman yang berharga dan strategis untuk membangun dan perbaikan sistem untuk menghadapi situasi dan tantangan yang akan datang. Permasalahan-permasalahan yang ditemui dan perlu untuk segera disikapi secara menyeluruh antara lain adalah:

1. Belum optimalnya sistem pelayanan publik.
2. Belum optimalnya kinerja organisasi
3. Belum Optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial serta menurunnya jumlah PPKS
4. Belum optimalnya pencapaian peserta KB aktif

2.3.3 Dampak terhadap Pencapaian Visi Misi

Penanggulangan bencana yang telah dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan dalam hal ini DINSOSP2KB Kota Pekalongan memegang peranan dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja pencapaian tujuan pemerintah. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam mencapai kinerja terbaik DINSOSP2KB Kota Pekalongan akan berdampak langsung pada kinerja yang telah ditetapkan.

Terkait dengan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Pekalongan tahun 2016-2021, kinerja DINSOSP2KB Kota Pekalongan berdampak pada pencapaian visi "*Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius*" dengan misi pertama "*Meningkatkan Kualitas pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat*" dan misi ketujuh "*Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisiem berdasarkan prinsop-prinsip Good Governance dan Clean Government*"

2.3.4 Tantangan dan Peluang

Berdasarkan Tugas dan Fungsi utama berkaitan dengan kegiatan Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Renstra Kementerian Sosial, Renstra BKKBN, hasil telaahan RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS Kota pekalongan, maka hal-hal yang menjadi tantangan dan peluang pada Pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

1.3.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pelayanan pada Dinsosp2kb antara lain :

1. Urusan Sosial

- a) Belum optimalnya system pelayanan publik
- b) Minimnya sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan pekerja sosial.
- c) banyaknya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial tetapi masih terbatasnya sarana penunjang.
- d) belum adanya database PMKS serta belum adanya terminasi (penyelesaian penanganan) PMKS secara berkelanjutan.
- e) Terbatasnya jumlah personil yang ada dibanding dengan jumlah PMKS yang perlu ditangani.

2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a) Belum optimalnya para penyelenggara kegiatan kelompok kegiatan (Poktan) BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKS.
- b) Belum optimalnya pembinaan terhadap kelompok kegiatan (Poktan) oleh petugas.
- c) Perlu lebih besar lagi dukungan stakeholder, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk meningkatkan keluarga yg berketahanan.
- d) Cara kerja / sistem komando yg kurang sinkron antara OPD KB kabupaten kota dengan para penyuluh KB yg statusnya sebagai tenaga pusat.
- e) Kurangnya pemahaman remaja tentang usia kawin pertama.

1.3.4.2 Peluang

Sejak diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, dan dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan, maka tugas dan fungsi terkait urusan Sosial dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi tanggungjawab Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peluang yang dapat disiasati untuk mendukung program pada urusan Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Pekalongan antara lain :

- a. Makin pesatnya perkembangan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dapat

dimanfaatkan untuk mengurangi jumlah PMKS dan penurunan angka fertilitas penduduk;

- b. Makin berperannya lembaga legislatif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat
- c. Terbukanya pengembangan kapasitas DINSOSP2KB melalui kerjasama dengan lembaga baik urusan sosial maupun pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.
- d. Makin terbukanya komunikasi dan koordinasi antar DINSOSP2KB Kota Pekalongan dengan masyarakat.
- e. Adanya peran serta masyarakat, PSKS dan LSM dalam penurunan jumlah PMKS,
- f. Adanya dukungan peningkatan sarana dan prasarana dalam operasional urusan sosial maupun pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana melalui kementerian / lembaga teknis.
- g. Adanya komitmen pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana dari APBD dan peluang belanja (Dana Alokasi Khusus) oleh pemerintah pusat.
- h. Adanya usaha-usaha peningkatan SDM tenaga pengelola KB oleh BKKBN perwakilan Provinsi Jawa Tengah berupa kegiatan orientasi dan pelatihan
- i. Adanya advokasi program KB terhadap pimpinan daerah kabupaten/kota.
- j. Tercukupinya rasio jumlah Penyuluh KB terhadap jumlah Kelurahan di Kota Pekalongan

Berdasarkan tantangan dan peluang tersebut maka kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan implementasi SOP Pelayanan Publik dalam mendukung capaian kinerja;
2. Meningkatkan dukungan administrasi perkantoran;
3. Meningkatkan dukungan ketercukupan sarpras aparatur;
4. Optimalisasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
5. Optimalisasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
6. Penerapan sistem pengendalian internal pemerintahan;
7. Peningkatan Perlindungan dan layanan jaminan Sosial bagi Keluarga Miskin.;
8. Peningkatan pelayanan sosial bagi PPKS(Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial);
9. Peningkatan graduasi KPM PKH;
10. Optimalisasi database kemiskinan;
11. Optimalisasi bantuan sosial bagi kelompok rentan;
12. Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana pada Taman Makam pahlawan;

13. Optimalisasi pendataan/updating data keluarga;
14. Penurunan angka kelahiran umur 15-19 tahun;
15. Peningkatan KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang);
16. Peningkatan peran serta ormas dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Dari uraian di atas, maka dapat diambil kebijakan yang tepat bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang guna mendukung pencapaian visi dan misi Kota Pekalongan serta program nasional maupun program SDGs (Sustainable Development Goals).

2.3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solusi atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah.

Isu Strategis pada pelayanan urusan Sosial dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut :

1. Pelayanan pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, dan dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkait urusan Sosial dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi tanggungjawab Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan.

2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Sosial

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Sasaran Jangka Menengah pada Kementerian Sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kemandirian Sosial Ekonomi Penduduk Miskin dan Rentan.
2. Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Permasalahan sosial yang berkaitan dengan ketimpangan akses dan penjangkauan pelayanan dasar
3. Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial, melalui penguatan skema layanan dan pendataan terpadu

3. Sasaran jangka menengah pada Renstra BKKBN

Arah kebijakan dan strategi BKKBN secara umum mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang dijabarkan dalam RPJMN 2020-2024, sasaran Renstra pada BKKBN adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga.
2. Menguatnya pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk
3. Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran.
4. Meningkatkan advokasi dan Penggerakan Program Bangga Kencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran.
5. Memperkuat sistem informasi keluarga yang terintegrasi

4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, telah ditetapkan 3 (tiga) pengembangan Kawasan Strategis Kota (KSK), yang meliputi : KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, KSK dari sudut kepentingan sosial budaya dan KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Sedangkan untuk struktur ruang wilayah kota meliputi Pusat Kegiatan yang terdiri dari 1 (satu) Pusat Pelayanan Kota (PPK), 4 (empat) Sub Pusat Pelayanan Kota dan 6 (enam) Pusat Lingkungan; serta Sistem Jaringan Prasarana

Meninjau RTRW Kota Pekalongan tentang pengembangan kawasan strategis Kota Pekalongan tersebut maka pelayanan pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan memiliki peluang dalam mencapai Indikator Kinerja Penurunan Warga Miskin (DTKS)

5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kondisi lingkungan di Kota Pekalongan merupakan wilayah rawan bencana hal ini disebabkan letak/wilayah Kota Pekalongan yang berada di pesisir pantai utara dan adanya penurunan permukaan tanah dengan rata-rata 11-23 cm per tahun, bencana yang terjadi di Kota Pekalongan ini menyebabkan rusaknya infrastruktur, mengganggu kesehatan dan berdampak secara ekonomi baik langsung maupun tidak langsung, Peningkatan abrasi

merusak bangunan di sekitar pesisir, hilangnya tambak dan sawah serta meningkatnya kerusakan mangrove.

Ditinjau dari kondisi lingkungan di Kota Pekalongan tersebut, maka pelayanan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki hambatan yang cukup besar terutama pada kondisi bencana rob yang menyebabkan banyaknya warga Kota Pekalongan yang terkena dampak rob yang harus dipenuhi kebutuhan dasarnya dan hal ini dapat menjadi penyebab menurunnya kesejahteraan hidup masyarakat.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, terutama pada faktor KLHS dapat diketahui bahwa Isu yang muncul di Kota pekalongan adalah pada permasalahan lingkungan hidup Kota Pekalongan yang dapat menurunkan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat seperti pencemaran air dan penurunan muka tanah (amblesan) yang berdampak besar terhadap peningkatan wilayah rawan bencana banjir dan rob.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dengan disusunnya Rancangan Awal RKPD Kota Pekalongan tahun 2025, telah dirumuskan rancangan program, kegiatan, subkegiatan yang akan dilaksanakan DINSOSP2KB Kota Pekalongan tahun 2025. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dengan membandingkan rumusan rancangan awal RKPD dengan kebutuhan OPD, terdapat perbedaan yang menyebabkan perubahan perumusan kebutuhan tersebut.

Perubahan rumusan kebutuhan dilakukan agar pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara lebih efisien, efektif dan optimal. Perubahan tersebut antara lain anggaran pagu kegiatan dan penyesuaian target dan indikator kegiatan. Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2023 dapat dilihat pada tabel T-C.31. sebagai berikut :

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan

Rancangan Awal RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	CATATAN PENTING
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	4.033.653	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	3.649.209	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	24.363	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	26.640	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	10.750	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	8.500	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	1.650	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	5.720	
1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 laporan	11.963	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 laporan	12.420	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	3.236.187	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	2.610.150	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang/bulan	3.186.237	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang/bulan	2.567.467	
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	48.300	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	39.300	
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 laporan	1.650	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 laporan	3.383	

Rancangan Awal RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	CATATAN PENTING
			Keuangan Akhir Tahun SKPD					Keuangan Akhir Tahun SKPD			
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian Administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	8.510	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian Administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	5.000	
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	8.510	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	5.000	
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	308.192	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	241.348	
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	10.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	7.300	
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	96.105	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	41.140	
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	7.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	4.110	
4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	75.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	82.318	
4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	10.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	5.480	
4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 dokumen	2.500	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 dokumen	1.000	
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 laporan	107.087	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 laporan	100.000	

Rancangan Awal RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	CATATAN PENTING
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	193.131	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	365.321	
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	2.400	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	1.760	
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	128.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	177.561	
5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 laporan	62.731	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 laporan	186.000	
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	263.270	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	400.750	
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekalongan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	67 unit	219.370	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekalongan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	69 unit	200.000	
6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit	25.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit	182.500	
6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 unit	18.900	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	63 unit	18.250	
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	75 persen	406.956	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	75 persen	386.432	

Rancangan Awal RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	CATATAN PENTING
7.	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)		Persentase Keluarga Miskin yang diberdayakan	10 persen	151.532	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)		Persentase Keluarga Miskin yang diberdayakan	10 persen	182.140	
7.1	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Kota Pekalongan	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	340 Keluarga	151.532	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Kota Pekalongan	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	340 Keluarga	182.140	
8.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang aktif	75 persen	255.424	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang aktif	75 persen	204.292	
8.1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 persen	104.541	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 persen	41.480	
8.2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 orang	150.883	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 orang	130.872	
8.3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 lembaga	0	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 lembaga	31.940	
III	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	100 persen	1.606.630	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	100 persen	1.720.232	

Rancangan Awal RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	CATATAN PENTING
9.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Persentase PPKS (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis) yang mendapat pelayanan sosial	100 persen	1.543.925	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Persentase PPKS (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis) yang mendapat pelayanan sosial	100 persen	1.161.926	
9.1	Penyediaan Permakanan	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	80 orang	190.280	Penyediaan Permakanan	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	80 orang	456.696	
9.2	Penyediaan Alat Bantu	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	7 orang	95.350	Penyediaan Alat Bantu	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	7 orang	0	
9.3	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	83 orang	60.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	83 orang	0	
9.4	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Pekalongan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	80 orang	1.198.295	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Pekalongan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	80 orang	643.860	
9.5						Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	80 orang	61.370	
10.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Persentase PPKS lainnya yang mendapat pelayanan sosial di luar panti sosial	3.98 persen	62.705	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Persentase PPKS lainnya yang mendapat pelayanan sosial di luar panti sosial	3.82 persen	558.306	

Rancangan Awal RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	CATATAN PENTING
10.1	Penyediaan Permakanaan	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	900 orang	0	Penyediaan Permakanaan	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	903 orang	428.560	
10.2	Penyediaan Alat Bantu	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	7 orang	0	Penyediaan Alat Bantu	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	23.540	
10.3	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	0 orang	0	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	0 orang	0	
10.4	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kota Pekalongan	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	0	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kota Pekalongan	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	16.010	
10.5	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	62.705	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	37.446	
10.6	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan	83 orang	0	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan	83 orang	52.750	

Rancangan Awal RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	CATATAN PENTING
			Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota			
IV	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan jaminan sosial	53.73	972.056	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan jaminan sosial	53.73	1.328.740	
11.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase graduasi KPM PKH	10 persen	972.056	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase graduasi KPM PKH	10 persen	1.328.740	
11.1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	2000 orang	636.650	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	2000 orang	564.920	
11.2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Pekalongan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	950 keluarga	335.406	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Pekalongan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	950 keluarga	763.820	
V	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	100 persen	480.139	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	100 persen	704.500	
12.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	100 persen	480.139	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	100 persen	704.500	
12.1	Penyediaan Makanan	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	2000 orang	450.000	Penyediaan Makanan	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	2000 orang	300.000	

Rancangan Awal RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	CATATAN PENTING
12.2	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	2000 orang	30.139	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	2000 orang	386.250	
12.3	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kota Pekalongan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	2000 orang	0	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kota Pekalongan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	2000 orang	18.250	
VI	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase pemeliharaan taman makam pahlawan	100 persen	434.453	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase pemeliharaan taman makam pahlawan	100 persen	191.020	
13	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Persentase Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	100 persen	434.453	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Persentase Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	100 persen	191.020	
13.1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 dokumen	379.453	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 dokumen	128.110	
13.2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 makam	55.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 makam	62.910	
VII	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga	100 persen	70.767	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga	100 persen	247.600	
14.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase ketersediaan dokumen KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	100 persen	70.767	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase ketersediaan dokumen KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	100 persen	247.600	
14.1	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kota Pekalongan	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 dokumen	70.767	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kota Pekalongan	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 dokumen	54.480	
14.2	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	6 laporan	0	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	27 laporan	145.120	

Rancangan Awal RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	CATATAN PENTING
14.3	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 dokumen	0	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	8 dokumen	48.000	
VIII	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Penurunan angka perkawinan di bawah 21 tahun	12 persen	2.559.918	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Penurunan angka perkawinan di bawah 21 tahun	12 persen	1.859.294	
15.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Persentase Angka kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (IKK Output)	8.24 perseribu	1.843.530	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya lokal		Persentase Angka kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (IKK Output)	8.24 perseribu	969.070	
15.1	Pengendalian Program KKBPK	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 laporan	0	Pengendalian Program KKBPK	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 laporan	80.010	
15.2	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 laporan	1.733.530	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	16 laporan	196.000	
15.3	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	48 laporan	0	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	48 laporan	111.360	

Rancangan Awal RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	CATATAN PENTING
15.4	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 dokumen	110.000	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 dokumen	381.700	
15.5	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kota Pekalongan	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	3 organisasi	0	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kota Pekalongan	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	3 organisasi	200.000	
16.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kepesertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia	20.6 persen	716.388	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kepesertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia	20.6 persen	890.224	
16.1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 laporan	0	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 laporan	62.452	
16.2	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1026 orang	0	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1026 orang	427.747	
16.3	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kota Pekalongan	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 unit	429.913	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kota Pekalongan	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 unit	199.995	
16.4	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 laporan	286.475	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 laporan	200.030	

Rancangan Awal RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	CATATAN PENTING
IX	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Unmeet need KB	13 persen	157.165	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Unmeet need KB	13 persen	1.955.520	
17.	Pelaksanaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 persen	157.165	Pelaksanaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 persen	1.955.520	
17.1	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Pekalongan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5 organisasi	157.165	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Pekalongan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5 organisasi	468.720	
17.2	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kota Pekalongan	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	11 laporan	0	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kota Pekalongan	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	11 laporan	708.000	

Rancangan Awal RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	CATATAN PENTING
17.3	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kota Pekalongan	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat Pendampingan	11 laporan	0	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kota Pekalongan	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat Pendampingan	11 laporan	778.800	

Sumber : Dinsos P2KB Kota Pekalongan, 2024

2.5 PENELAHAH USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sebelum melakukan penyusunan program, kegiatan yang akan dilaksanakan di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan, terlebih dahulu telah dilakukan penjangkaran aspirasi masyarakat, baik terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang berupa usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan perangkat daerah, asosiasi asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan pengamatan pelaksanaan musrenbang tingkat kota. Terhadap aspirasi tersebut kemudian dilakukan inventarisasi dan pengkajian apakah sesuai dengan isu isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan hasil analisis kebutuhan perangkat daerah.

Usulan awal program, kegiatan dan sub kegiatan dari perangkat daerah kemudian diselaraskan dengan usulan dan kebutuhan masyarakat melalui Musrenbang, baik musrenbang kelurahan maupun kecamatan dan kota, serta forum perangkat daerah. Dalam kegiatan ini kemudian diinventarisir pula usulan yang masuk melalui Pagu Indikatif. Sebagai sebuah konsekuensi atas telah ditandatanganinya kesepakatan antara Walikota sebagai pihak Eksekutif dengan DPRD sebagai lembaga legislatif tentang penetapan pagu anggaran, maka semua usulan masyarakat yang masuk sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus dilaksanakan oleh perangkat daerah. Usulan yang dibuat oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah telah disesuaikan dan telah mengakomodir semua usulan dari pemangku kepentingan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. Pada proses Rancangan Awal Renja, belum ada usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan Dinsos P2KB Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat disajikan dalam tabel T-C.32. sebagaimana terlampir.

Tabel T-C.32.

**Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
DINSOSP2KB Kota Pekalongan
Tahun Anggaran 2025**

No	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1.	Program Penanganan Bencana Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Subkegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kota Pekalongan	Penanganan Kelompok Rentan pasca bencana	Rp. 365.000.000	

Sumber : Dinsos P2KB Kota Pekalongan, 2024

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Arah kebijakan Nasional yang berdasarkan RPJMN 2020-2024 yang telah ditetapkan, dengan mengusung tema “Terwujudnya Indonesia yang maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasar gotong royong”. Terdapat 7 agenda (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; (4) Membangun kebudayaan dan karakter bangsa; (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; (7) Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Kebijakan Kementerian Sosial sesuai dengan yang tertuang dalam RPJM Kementerian Sosial 2020-2024 sebagai berikut:

4. Meningkatkan kemandirian sosial ekonomi, penduduk miskin dan rentan;
5. Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
6. Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial, melalui penguatan skema layanan dan pendataan terpadu;
7. Terwujudnya tata kelola kementerian sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik.

Sedangkan untuk kebijakan kementerian BKKBN yang tertuang dalam RPJM BKKBN 2020-2024 adalah :

1. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistic dan integrative sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter dikeluarga;
2. Menguatnya pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
3. Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif berbasis kewilayaahan dan focus pada segmentasi sasaran;

4. Meningkatkan advokasi penggerakan program Bangka kencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran;
5. Memperkuat system informasi keluarga yang terintegrasi.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan berkewajiban melakukan penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai dokumen perencanaan teknis turunan dari RPJMD Kota Pekalongan.

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu-isu strategis dan juga kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Berdasarkan telaah arah pembangunan Kota Pekalongan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Pekalongan 2021-2026, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan DINSOSP2KB. Adapun pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah DINSOSP2KB Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel T-C.25 berikut:

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP OPD	79.67 71.50	79.92 73.00	80.17 74.50	80.42 76.00	80.67 77.50
2.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial serta Menurunnya Jumlah PPKS	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS) Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1.0 3.32	1.0 3.43	2.0 3.55	2.5 3.68	3.0 3.82
3.	Menurunkan angka Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)	Meningkatnya Kepesertaan KB Aktif	Total fertility Rate (Angka Kelahiran Total) (IKK Outcome) Persentase Pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	2.164 67.45	2.162 67.50	2.160 67.55	2.158 67.60	2.156 67.65

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan/Subkegiatan Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Perangkat Daerah, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program/kegiatan/Subkegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Perangkat daerah menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, kebijakan provinsi dan kebijakan pemerintah daerah.

Rencana kerja tahun 2025 merupakan lanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas untuk mewujudkan tujuan dan sasarannya. Hal ini terlihat dari beberapa Subkegiatan yang dilaksanakan pada sebelumnya sebagian besar masih dilaksanakan pada tahun 2025. Pada prinsipnya program, kegiatan dan Subkegiatan disusun berdasarkan skala prioritas sesuai pagu indikatif yang ditetapkan.

Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebanyak 9 program, 17 kegiatan dan 54 Subkegiatan dengan jumlah pagu Rp. 12.042.547.000,- yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) NonFisik. Adapun program, kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2025 tersebut dapat dilihat pada tabel T-C.33 sebagai berikut :

**Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan
Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Pekalongan**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 persen	3.668.855			100 persen	3.649.209
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100 persen	19.925			100 persen	26.640
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen renja yang disusun	Kota Pekalongan			Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	2 dokumen	8.500
				2 dokumen	2.500				
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun	Kota Pekalongan			Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	2 dokumen	5.720
				2 dokumen	1.500				
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan) Jumlah Dokumen SPIP (1 dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 Laporan Pemantauan RTP yang disusun	Kota Pekalongan			Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	15 laporan	12.420
				12 bulan	15.925				
				4 dokumen					
				2 dokumen					
				5 dokumen					
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah		100 persen	2.456.085			100 persen	2.610.150
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan	14 Kali	2.404.760	Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	20 orang/bulan	2.567.467
1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Pekalongan			Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	12 dokumen	39.300
				12 bulan	49.675				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1.06.01 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun	Kota Pekalongan	1 dokumen	1.650	Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	1 laporan	3.383
1.06.01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 persen	5.000			100 persen	5.000
1.06.01 2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik	Kota Pekalongan	1 kali	5.000	Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	1 paket	5.000
1.06.01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah		100 persen	377.887			100 persen	241.348
1.06.01 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan pembangunan kantor	Kota Pekalongan	12 bulan	10.000	Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	4 paket	7.300
1.06.01 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Kota Pekalongan	12 bulan 17 Unit	137.787	Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	2 paket	41.140
1.06.01 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	Kota Pekalongan	12 bulan	12.500	Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	4 paket	4.110
1.06.01 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	Kota Pekalongan	11 bulan	75.100	Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	4 paket	82.318
1.06.01 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan	Kota Pekalongan	12 bulan	10.000	Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	2 paket	5.480
1.06.01 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang- undangan	Kota Pekalongan	12 dokumen	2.500	Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	1 dokumen	1.000
1.06.01 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	Kota Pekalongan	150 orang/kali	130.000	Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	150 laporan	100.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	239.147			100 persen	365.321
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan			Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	4 laporan	1.760
		Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat		12 bulan	2.400				
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Pekalongan			Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	12 laporan	177.561
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 bulan	137.147				
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan			Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	12 laporan	186.000
		Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan/bahan kebersihan kantor		12 bulan	99.600				
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 persen	570.811			100 persen	400.750
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Pekalongan			Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	69 unit	200.000
		Jumlah bulan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas/operasional		12 bulan	262.864				
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Pekalongan			Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	8 unit	182.500
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala		1 unit	287.797				
1.06.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Pekalongan			Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	63 unit	18.250
		Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara rutin/berkala		12 bulan	20.150				
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan		58 persen	533.801			75 persen	386.432
1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase Keluarga Miskin yang diberdayakan		10 persen	169.406			10 persen	182.140
1.06.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan			Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	340 Keluarga	182.140
		Jumlah bulan pendampingan program KUBE		12 Bulan	169.406				
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang aktif		75 persen	364.395			75 persen	204.292
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan				Kota Pekalongan	30 persen	41.480

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
	Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah rakor pembinaan psks yang dilaksanakan Jumlah bulan Fasilitasi pembinaan PSKS		6 Kali 12 Bulan	124.115	Dana Alokasi Umum			
1.06.02. 2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Jumlah bulan Fasilitasi pembinaan PSKS Jumlah TSKS yang difasilitasi	Kota Pekalongan			Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	4 orang	130.872
1.06.02. 2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah fasilitasi Karang Taruna	Kota Pekalongan			Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	1 lembaga	31.940
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)		100 persen	1.602.420			100 persen	1.720.232
1.06.04. 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis) yang mendapat pelayanan sosial		100 persen	1.164.010			100 persen	1.161.926
1.06.04. 2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah pemberian permakanan yang diberikan	Kota Pekalongan			Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	80 orang	456.696
1.06.04. 2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah bulan pelayanan PMKS di RPSBM	Kota Pekalongan			Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	80 orang	643.860
1.06.04. 2.01.06	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	-	-	-	Kota Pekalongan	80 orang	61.370
1.06.04. 2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS lainnya yang mendapat pelayanan sosial di luar panti sosial		3.98 persen	438.410			3.82 persen	558.306

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
1.06.04. 2.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan		249.005	Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	903 orang	428.560
		Jumlah anggota veteran dan ahli waris pejuang 3 oktober yang mendapat bantuan sembako		83 Orang					
		Jumlah disabilitas yang mendapat bantuan sembako		225 Orang					
		Jumlah lansia yang mendapat bantuan sembako		600 Orang					
1.06.04. 2.02.05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan		71.720	Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	10 orang	23.540
		Jumlah kegiatan pelayanan anak rentan kesejahteraan sosial		1 Kegiatan					
		Jumlah PMKS yang mendapat alat bantu		11 Orang					
		Jumlah wanita rawan sosial yang mendapat pelatihan		10 Orang					
1.06.04. 2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	-	-	-	Kota Pekalongan	15 orang	16.010
1.06.04. 2.02.09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan		58.657	Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	10 orang	37.446
		Jumlah warga miskin yang difasilitasi nikah massal		10 Pasang					
1.06.04. 2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan		59.028	Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	83 orang	52.750
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		83 orang					
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan jaminan sosial		53.73	1.614.996			53.73	1.328.740
1.06.05. 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase graduasi KPM PKH		10 persen	1.614.996			10 persen	1.328.740
1.06.05. 2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kota Pekalongan			Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	2000 orang	564.920

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
		Jumlah bulan fasilitasi BPNT		12 Bulan	667.559				
		Jumlah bulan pelayanan SLRT		12 Bulan					
		Jumlah dokumen database kemiskinan yang disusun		1 Dokumen					
1.06.05 2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan		947.437	Dana Alokasi Umum – DBH Cukai Hasil Tembakau	Kota Pekalongan	950 keluarga	763.820
		Jumlah bulan pendampingan PKH		12 Bulan					
		Jumlah KPM PKH yang mendapatkan sosialisasi		200 Orang					
		Jumlah Penerima DBHCHT		500 Orang					
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)		100 persen	1.720.304			100 persen	704.500
1.06.06 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial		100 persen	1.720.304			100 persen	704.500
1.06.06 2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan		445.304	Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	2000 orang	300.000
		Jumlah kegiatan bantuan untuk korban bencana alam yang difasilitasi		1 Kegiatan					
1.06.06 2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan		1.275.000	Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	2000 orang	386.250
		Jumlah bulan fasilitasi bantuan sosial bagi kelompok rentan		12 Bulan					
1.06.06 2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	-	-	-	Kota Pekalongan	2000 orang	18.250
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pemeliharaan taman makam pahlawan		100 persen	92.382			100 persen	191.020
1.06.07 2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan		100 persen	92.382			100 persen	191.020
1.06.07 2.01.01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan			Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	1 dokumen	128.110

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
	Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		1 dokumen	26.830				
1.06.07. 2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota Jumlah bulan pemeliharaan taman makam pahlawan Jumlah taman makam pahlawan yang dilakukan pemeliharaan	Kota Pekalongan			Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	1 makam	62.910
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga		100 persen	66.116			100 persen	247.600
2.14.02. 2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)		100 persen	66.116			100 persen	247.600
2.14.02. 2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya Jumlah dokumen informasi kependudukan dan keluarga yang disusun Jumlah dokumen pendataan keluarga sejahtera yang disusun	Kota Pekalongan		66.116	Dana Alokasi Umum	Kota Pekalongan	1 dokumen	54.480
2.14.02. 2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kota Pekalongan	-	-	-	Kota Pekalongan	27 laporan	145.120
2.14.02. 2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kota Pekalongan	-	-	-	Kota Pekalongan	8 dokumen	48.000
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Penurunan angka perkawinan di bawah 21 Tahun		12 persen	5.576.903			12 persen	1.859.294
2.14.03. 2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Angka kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (IKK Output)		8.24 perseribu	3.517.897			8.24 perseribu	969.070
2.14.03. 2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Kota Pekalongan	-	-	-	Kota Pekalongan	2 laporan	80.010
2.14.03. 2.01.10	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Jumlah bulan penyediaan operasional Balai Penyuluhan KB	Kota Pekalongan			DAK Non Fisik – BOKKB - BOKB	Kota Pekalongan	16 laporan	196.000
				12 Bulan	3.419.857				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
2.14.03.2.01.11	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kota Pekalongan	-	-	-	Kota Pekalongan	48 laporan	111.360
2.14.03.2.01.12	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kota Pekalongan			Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik – BOKKB -BOKB	Kota Pekalongan	1 dokumen	381.700
	Jumlah kelompok masyarakat yang diberikan informasi pembangunan keluarga kependudukan dan KB melalui penyuluhan langsung	51 Kelompok		98.040					
2.14.03.2.01.14	Advokasi Program Bangga Kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kota Pekalongan	-	-	-	Kota Pekalongan	3 organisasi	200.000
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepesertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia		20.6 persen	2.059.006			20.6 persen	890.224
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Pekalongan	-	-	-	Kota Pekalongan	12 laporan	62.452
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Pekalongan	-	-	-	Kota Pekalongan	1026 orang	427.747
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kota Pekalongan			DAK Fisik – BOKB - KB	Kota Pekalongan	1 unit	199.995
	Jumlah sarana prasarana pelayanan KB pada kelompok kegiatan yang diadakan	20 unit		1.850.531					
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kota Pekalongan			Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik – BOKKB -BOKB	Kota Pekalongan	1 laporan	200.030
	Jumlah PUS dari keluarga miskin yang mendapat pelayanan KB	480 Orang		208.475					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Unmeet need KB		13 persen	178.324			13 persen	1.955.520
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		100 persen	178.324			100 persen	1.955.520
2.14.04.2.02.01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Pekalongan			Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik – BOKKB -BOKB	Kota Pekalongan	5 organisasi	468.720
	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kegiatan PPKBD, KKB, kelompok kegiatan, rumah data kependudukan dan PPKS yang difasilitasi		5 Kegiatan	178.324				
2.14.04.2.02.05	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kota Pekalongan	-	-	-	Kota Pekalongan	11 laporan	708.000
2.14.04.2.02.06	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat Pendampingan	Kota Pekalongan	-	-	-	Kota Pekalongan	11 laporan	778.800

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan rencana program, kegiatan, dan subkegiatan DINSOSP2KB Kota Pekalongan dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renstra, pencapaian Renstra, dan visi dan misi Kota Pekalongan yang tertuang dalam RPJMD. Program kerja utama DINSOSP2KB Kota Pekalongan sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMD Kota Pekalongan adalah :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
3. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
4. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
5. PROGRAM PENANGANAN BENCANA
6. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
7. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
8. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
9. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

Indikator kinerja dari program tersebut menjadi tanggung jawab DINSOSP2KB Kota Pekalongan dalam evaluasi RKPD dan LKPJ.

Dalam Rencana Kerja DINSOSP2KB Kota Pekalongan Tahun 2025 terdapat 9 Program, 17 kegiatan dan 54 Subkegiatan, yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah. Perumusan kegiatan pada setiap program telah mensinkronisasi peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program.

Seluruh kegiatan DINSOSP2KB Kota Pekalongan yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), DAK NonFisik – BOKB - KB, DAK Fisik serta DBHCHT.

Rencana Kerja dan Pendanaan DINSOSP2KB Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinsos P2KB Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	7.980.133.000		
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah KABUPATEN/KOTA	3.649.209.000	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.640.000	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.500.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.720.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2 dokumen
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.420.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 laporan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.610.150.000	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.567.467.000	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 orang/bulan
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39.300.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.383.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen
7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	241.348.000	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.300.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.140.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.110.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	82.318.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.480.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.000.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 laporan
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	365.321.000	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.760.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	177.561.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	186.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	400.750.000	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.000.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	67 unit
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	182.500.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.250.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 unit

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja
B	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	386.432.000	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	75 persen
7	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	182.140.000	Persentase Keluarga Miskin yang diberdayakan	10 persen
21	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	182.140.000	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	340 keluarga
8	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	204.292.000	Presentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang aktif	75 persen
22	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	41.480.000	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang
23	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	130.872.000	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 orang
24	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	31.940.000	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 lembaga
C	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.720.232.000	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	100 persen
9	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.161.926.000	Persentase PPKS (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis) yang mendapat pelayanan sosial	100 persen
25	Penyediaan Permakanan	456.696.000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	80 orang
26	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	643.860.000	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	80 orang
27	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	61.370.000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	80 orang
10	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	558.306.000	Persentase PPKS lainnya yang mendapat pelayanan sosial di luar panti sosial	3.98 persen
28	Penyediaan Permakanan	428.560.000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	903 orang
29	Penyediaan Alat Bantu	23.540.000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang
30	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	16.010.000	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang
31	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	37.446.000	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang
32	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	52.750.000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	83 orang
D	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.328.740.000	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	53.73 persen
11	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.328.740.000	Persentase graduasi KPM PKH	10 persen
33	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	564.920.000	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	2000 orang

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja
34	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	763.820.000	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	950 keluarga
E	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	704.500.000	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	100 persen
12	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	704.500.000	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	100 persen
35	Penyediaan Makanan	300.000.000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	2000 orang
36	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	386.250.000	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	2000 orang
37	Pelayanan Dukungan Psikososial	18.250.000	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	2000 orang
F	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	191.020.000	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100 persen
13	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	191.020.000	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100 persen
38	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional	128.110.000	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 dokumen
39	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	62.910.000	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 makam
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.062.414.000		
G	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	247.600.000	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga	100 persen
14	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	247.600.000	Persentase ketersediaan dokumen KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	100 persen
40	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	54.480.000	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 dokumen
41	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	145.120.000	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	6 laporan
42	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	48.000.000	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 dokumen
H	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.859.294.000	Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun	7.40 persen
15	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	969.070.000	Persentase angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun	8.24 perseribu
43	Pengendalian Program KKBPK	80.010.000	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 laporan
44	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	196.000.000	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 laporan
45	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	111.360.000	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	48 laporan
46	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	381.700.000	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 dokumen
47	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	200.000.000	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	3 organisasi

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja
16	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	890.224.000	Persentase kepesertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia	20.6 persen
48	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	62.452.000	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 laporan
49	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	427.747.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1026 orang
50	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	199.995.000	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 unit
51	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	200.030.000	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 laporan
I	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.955.520.000	Unmeet need KB	13 persen
17	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.955.520.000	Persentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 persen
52	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	468.720.000	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5 organisasi
53	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	708.000.000	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	11 laporan
54	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	778.800.000	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	11 laporan
Jumlah		12.042.547.000		

Sumber : Dinsos P2KB Kota Pekalongan, 2024

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan terkait perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja (Renja) DINSOSP2KB Kota Pekalongan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan selama satu tahun kedepan. Renja disusun mengacu pada visi misi Walikota Pekalongan dan berpedoman kepada Perubahan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2126, Renstra DINSOSP2KB Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025.

5.1 Catatan Penting

Terbatasnya alokasi anggaran serta proses penganggaran dalam menerapkan SPM yang masih mengikuti prosedur normatif, sebagaimana penganggaran rutin harus mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan penerapan SPM. Untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja DINSOSP2KB Kota Pekalongan tahun 2025, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Substansi Renja DINSOSP2KB Kota Pekalongan disusun terukur berdasarkan tatalaksana arah kebijakan dalam RKPD Kota Pekalongan tahun 2025 dan Renstra Ketiga DINSOSP2KB Kota Pekalongan tahun 2021-2026.
- b. DINSOSP2KB Kota Pekalongan berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) DINSOSP2KB Kota Pekalongan Tahun 2025 serta diselaraskan dengan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025.

- c. DINSOSP2KB Kota Pekalongan berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 yang berpedoman kepada Renja DINSOSP2KB Kota Pekalongan Tahun 2025 dan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025 dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.
- d. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja DINSOSP2KB Kota Pekalongan Tahun 2025, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program, kegiatan, dan subkegiatan tahun 2025.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja (RENJA) DINSOSP2KB Kota Pekalongan selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja DINSOSP2KB. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf DINSOSP2KB Kota Pekalongan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

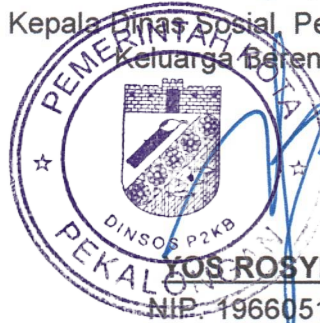
Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja DINSOSP2KB Kota Pekalongan Tahun 2025 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Apabila terdapat kendala dalam pencapaian indikator kinerja yang telah direncanakan, baik diakibatkan oleh anggaran yang kurang memadai ataupun permasalahan teknis lainnya, dapat dilakukan penajaman dan perbaikan melalui perubahan rencana kerja.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan yang diemban oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai salah satu Perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Pekalongan.

Semoga Renja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kota Pekalongan sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kota Pekalongan.

Pekalongan, 8 Agustus 2024

Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Pekalongan



YOS ROSYIDI S.I.P., M.Si.

NIP. 19660516 198603 1 007